

ABSTRAK

Rika Apriyanti : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Pontianak. Skripsi. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak 2022.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait larangan anak untuk mengemis masih belum optimal, masih terdapat anak-anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur, hal ini berpengaruh pada ketertiban umum yang dapat mengganggu lalu lintas dan membahayakan bagi anak tersebut dan banyak orang. Melihat masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur belum optimal. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa Komunikasi antar organisasi sudah baik dan sosialisasi juga sudah dilakukan, tetapi terhadap masyarakat belum optimal, penyampaian informasi serta sosialisasi tentang larangan untuk memberi harus ditingkatkan. Sumber Daya yang dimiliki oleh Satpol PP dalam melakukan sosialisasi sdm dan anggaran sudah memadai, tetapi untuk Dinas Sosial masih terdapat kekurangan dalam sdm dan anggarannya. Disposisi sepenuhnya mendukung untuk mencapai tujuan kebijakan dan juga melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi dalam praktik lapangan masih terdapat anak yang mengemis. Struktur Birokrasi mengenai kejelasan SOP sudah baik sehingga pekerjaan terarah. Rekomendasi pada penelitian ini adalah perlu ditingkatkannya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait larangan anak mengemis serta sosialisasi terkait larangan masyarakat untuk memberi uang kepada anak tersebut.

Kata Kunci; Implementasi Kebijakan, Larangan, anak mengemis

ABSTRACT

Rika Apriyanti: *The Implementation of the Regional Regulation of Pontianak City Number 19 of 2021 on the Implementation of Peace, Public Order, and Public Protection in Pontianak City. Thesis. Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura, Pontianak 2022.*

The implementation of the Regional Regulation of Pontianak City Number 19 of 2021 on the Implementation of Peace, Public Order, and Public Protection related to the prohibition of children begging was still not optimal, there were still children begging at traffic lights in Pontianak Timur, District affecting the public order which could disrupt traffic and be dangerous for these children and many people. This study aimed to describe and analyze the factor that caused the implementation of the Regional Regulation of Pontianak City Number 19 of 2021 on the Implementation of Peace, Public Order, and Public Protection related to the prohibition of children begging was not optimal yet. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study showed that although communication between groups had been effective and socialization had been conducted, the community was not yet at its peak; information dissemination and socialization about the prohibition of contributing must be strengthened. The municipal police's resources in terms of socializing human resources and funding were enough, however, there were still gaps in human resources and budget for the Social Department. Although the disposition was fully supportive of accomplishing policy objectives as well as carrying out their tasks and responsibilities, there were still children who begged. The bureaucratic structure was good in terms of SOP clarity, so that work was directed. The researcher suggests that it is necessary to increase the socialization of the Regional Regulation of Pontianak City Number 19 of 2021 on the Implementation of Peace, Public Order, and Community Protection related to the prohibition of children begging and socialization related to the prohibition of the community to give money to the child.

Keywords: *Policy Implementation, Prohibition, Children Begging.*



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pontianak”. Peneliti mengangkat judul ini implementasi ketertiban umum khususnya terkait larangan anak untuk mengemis masih belum berjalan dengan optimal. Peneliti menemukan beberapa masalah dalam pengimplementasian peraturan tersebut, salah satunya masih terdapat anak yang mengemis dilampu lalu lintas dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait larangan anak mengemis dan terkait larangan untuk memberi uang. Rumusan masalah yang peneliti angkat adalah “Mengapa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur masih belum optimal?”

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya dengan menggunakan alat pengumpulan data adalah panduan wawancara dan kamera. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan teknik pemeriksaan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

Adapun untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dipengaruhi empat faktor. Menurut Edward III

(dalam Agustino, 2014:149-153) yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait larangan anak untuk mengemis belum optimal, masih terdapat anak-anak mengemis dilampu lalu lintas terutama di Kecamatan Pontianak Timur. Sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan untuk tidak memberi uang masih belum terlaksana dengan baik sehingga masyarakat masih merasa kasihan dan dengan mudah memberikan uang kepada anak tersebut.

Adapun saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu perlu ditingkatkannya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat khususnya terkait larangan mengemis agar anak tersebut mendapat pandangan bahwa mereka tidak boleh melakukan aktivitas di jalan untuk keselamatan mereka sendiri dan sosialisasi kepada orang tua juga perlu ditingkatkan hingga orang tua dapat memahami akan tanggung jawab mereka kepada anaknya serta sosialisasi terkait larangan masyarakat untuk tidak memberi uang kepada anak tersebut dan perlu ditingkatkannya pengawasan ditempat-tempat yang sekiranya masih berkeliaran anak-anak yang mengemis terutama dilampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur, hal ini dikarenakan pentingnya pengawasan agar anak tersebut takut untuk mengemis di jalanan lampu lalu lintas dan membuat efek jera kepada anak tersebut. Hal ini dilakukan agar terjadinya ketertiban umum dan juga untuk keselamatan dan kebaikan anak tersebut.